

DAFTAR BACAAN**Buku**

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Isnaini, Yusran, *Memahami Desa (Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya)*, Pradipta Pustaka Media, 2019
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Kepemimpinan Perempuan Di Desa*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Media, Jakarta, 2005
- Purnama, Eddy, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University, Banda Aceh, 2008
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Rozaki, Abdul, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Ire Pres, Yogyakarta, 2005
- Sadu, Wasistiono, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2007
- Thaib, Dahlan, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Ulfiah, Ufi, *Perempuan di Panggung Politik*, Rahima, Jakarta, 2007

Wahidin, Samsul, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2007

Jurnal

Firdaus, Emilda, 'Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Riau University*, Vol 2, No 1, 2011

Hardjaloka, Loura, 'Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi', *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, No 2, 2012

Jamil, Nuraida, 'Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW', *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol 6, No 2, 2014

Langoy, Fitrianingih, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan', *Jurnal Politico*, Vol 5 No 1, 2016

Nurchahyo, Abraham, 'Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen', *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol 6, No 1, 2016

Rachmanto, Munif, 'Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Jalannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Lamongan', *Jurnal Independent Fakultas Hukum UNISLA*, Vol 4, No 1, 2016

Roza, Darimini, Laurensius Arliman S, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa', *Padjajaran Journal of Law*, Vol 4 No 3, 2017

- Run, Muhamad *et al*, 'Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintah, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat', *Rez Publica*, Vol 4 No 2, 2018
- Saraswati, Retno, 'Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)', *Jurnal Masalah Masalah Hukum: Faculty of Law Diponegoro University*, Vol 43, No 3, 2014
- Tahir, M. Irwan 'Sejarah Perkembangan Desa Di Indonesia: Desa Di Masa Lalu, Masa Kini Dan Bagaimana Masa depannya', *Jurnal Ilmu Pemerintahan: IPDN*, No 38, 2018

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan
Kesejahteraan Keluarga;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Skripsi

Amaliyah Achmad, Isyrofah, *Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Partai Politik*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2017

Mirantino, Yokebet, *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017

Rifqi Hidayat, Aulia, *Studi Komparatif Pengisian Jabatan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Internet

<http://www.selakambang.desa.id/melihat-desa-dari-penjelasan-atas-undang-undang-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa/>

<https://fh.uii.ac.id/blog/tag/representation-in-presence-dan-representation-in-ideas/>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2173/seandainya-semua-orang-paham-kesetaraan-gender>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action>

<https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/peran-perempuan-dalam-pembangunan-desa-cerita-dari-desa-sidomulyo/>

<https://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/>

<https://sekolahdesa.or.id/menjadi-bpd-perempuan-di-tengah-budaya-patriarki/>

<https://www.pelajaran.co.id/2017/24/pengertian-kedudukan-tugas-fungsi-dan-macam-lembaga-kemasyarakatan-desa.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ef26d6b1e2e/dasar-hukum-karang-taruna/>